

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Di era globalisasi sekarang ini, perkembangan dunia usaha semakin pesat. Hal itu dapat dilihat dari perkembangan pengetahuan, kemajuan teknologi dan perkembangan arus informasi yang harus disampaikan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Perkembangan ini diiringi dengan persaingan usaha yang begitu ketat dan kompetitif. Persaingan usaha yang ada perlu diimbangi dengan suatu pemikiran yang kritis dan pemanfaatan sumber daya perusahaan secara optimal. Dengan demikian, perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Persaingan perusahaan yang begitu kompetitif, harus didukung dengan penyajian laporan keuangan yang rapi. Laporan keuangan dapat memperlihatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan ini menunjukkan kondisi dan posisi keuangan perusahaan. Kondisi dan posisi keuangan perusahaan dapat mengalami perubahan setiap periodenya sesuai dengan operasi yang berlangsung di perusahaan apalagi dalam suatu perbankan yang ada di Indonesia.

Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, yang kegiatan pokoknya mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

- Menerima penyimpanan dana masyarakat dalam berbagai bentuk.

- Menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit kepada masyarakat,.(untuk mengembangkan usaha).
- Melaksanakan berbagai jasa dalam kegiatan perdagangan dan pembayaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri serta berbagai jasa lainnya di bidang keuangan. Antara lain Inkaso transfer, traveler check, credit card, safe deposit box, jual beli surat berharga dan lain - lain

Didalam perbankan terdapat 4 jenis perbankan yang terdapat di indonesia yaitu Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat(BPR) dan juga Bank syariah dimana setiap pelaksanaan, tugas serta fungsi berbeda beda. Namun di salah satu perbankan tersebut dalam melaksanakan usaha perusahaannya dengan menggunakan prinsip islam dan syariah yaitu bank Syariah Dan Bank Perkreditan rakyat.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPR sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang berbadan hukum, adalah salah satu jenis lembaga usaha perbankan yang mempunyai peranan penting dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dibidang jasa keuangan khususnya untuk Usaha Kecil dan Mikro (UKM). Oleh sebab itu BPR harus selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga tumbuh dengan sehat dan dapat melaksanakan fungsi intermediasinya

sesuai dengan yang diharapkan kelompok sasarannya dan masyarakat lain pada umumnya.

Ada beberapa fenomena yang terjadi saat sekarang yaitu Dari data BI diketahui bahwa masih banyak UMKM yang belum tersentuh oleh BPR yaitu sekitar 60% dari total 51,3 juta unit UMKM belum terhubung pada layanan perbankan. Porsi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan hanya sebesar 21,5% dan penyebaran BPR pun masih belum merata. Jumlah BPR yang dibuka pun perlu mendapatkan perhatian jika ingin pembangunan mampu mencapai pelosok Indonesia. Dari jumlah BPR konvensional saja, saat ini terdapat 1665 BPR konvensional dimana 10 provinsi yang paling banyak BPR-nya adalah: 331 BPR terdapat di Jawa Timur (19,88%), 321 di Jawa Barat (19,28%), 263 di Jawa Tengah (15,80%), 137 di Bali (8,23%), 99 di Sumatera Barat (5,95%), 70 BPR di Banten (4,20%), 54 di Yogyakarta (3,24%), 53 di Sumatera Utara (3,18%), 39 di Kepulauan Riau (2,34%), dan 31 di Riau (1,86%) serta sisanya 267 BPR tersebar di 23 provinsi lainnya (16,04%).

Memang pembukaan BPR tentunya akan lebih disukai oleh pemodal jika dilakukan di daerah yang memiliki prospek ekonomi yang lebih baik namun perlu diperhatikan juga daerah-daerah yang masih terbatas dan kurang terlayani oleh jasa perbankan mengingat tujuan dibukanya BPR adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat terutama masyarakat yang sulit ke Bank Umum.

Sampai saat ini memang terdapat peningkatan berkelanjutan dari kredit yang diberikan BPR. Data BI menunjukkan terjadi peningkatan jumlah kredit yang diberikan dari 16.948 Miliar Rupiah di tahun 2006 ke 41.100 Miliar Rupiah pada Desember 2011. Hal ini disertai dengan mulai membaiknya tingkat NPL mencapai 5,56% persen pada Januari 2012 walaupun masih terus perlu ditekan karena masih di atas batas kriteria 5%. NPL yang tinggi dapat mengakibatkan dana cadangan dipakai untuk menutup kehilangan terutama jika tidak ada pengurangan deviden dan hal ini dimungkinkan meningkatkan beban kepada klien sehingga perlu segera diatasi. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya sebagian besar bentuk usaha di ASEAN adalah usaha kecil dan menengah. Bagi UMKM untuk dapat ikut memanfaatkan peluang dan bersaing tentunya membutuhkan berbagai fasilitas pendanaan dan perbankan untuk membiayai usaha masing-masing, memelihara atau bahkan mengembangkan usahanya. BI sendiri menyatakan bahwa upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata, Perlu diingat bahwa di Indonesia, UMKM selain merupakan bentuk usaha mayoritas di Indonesia (99,9%) juga menyerap tenaga kerja yang sangat besar (97,04%) serta menghasilkan lebih dari separuh PDB Indonesia sehingga di sini peran BPR sebagai lembaga yang menyalurkan kredit investasi dan modal kerja sangat penting dalam menyokong kekuatan dari UMKM nasional yang adalah sebagai kekuatan utama Indonesia. Selain itu penyaluran kredit kerja dan modal dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi dari UMKM bahkan berpengaruh positif pada inflasi. BPR juga dapat membantu nasabah dalam mengembangkan

usahanya melalui edukasi kepada nasabah sehingga mampu memanfaatkan setiap peluang yang datang. Oleh karena itu masalah besarnya UMKM yang tidak terlayani oleh jasa perbankan merupakan masalah kritis yang perlu diatasi dengan pengembangan BPR dalam menjangkau nasabah yang lebih luas dengan tingkat kredit pinjaman yang terjangkau. (www.bi.go.id)

Penyampaian Ketua Umum Perbarindo Joko Suyanto, saat memberikan sambutan pada rapat kerja nasional (Rakernas) di Kota Batam, akhir November tahun lalu. Dihadapan peserta Rakernas Joko menyebutkan kualitas kinerja yang membaik tersebut tercermin dari penurunan non performing loan (NPL/rasio kredit bermasalah menjadi 5,34% pada tahun ini, jumlah itu terus mengalami penurunan sejak 2008. Disamping itu BPR juga berhasil menyalurkan kredit hingga menembus Rp50 triliun sampai akhir September atau meningkat sekitar 22% jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar yang hanya tumbuh sekitar 21%. Sementara dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun BPR hingga akhir September 2012 berhasil menembus Rp51,4 triliun dengan rincian Deposito Rp29,1 triliun, Linkage Rp 9 triliun dan tabungan Rp13,3 triliun. “Dari ukuran kualitas dan kuantitas, kinerja BPR semakin membaik serta tetap eksis, demand produk BPR masih tinggi, dan BPR terus merubah diri dan terus diperbaiki,” katanya usai pembukaan Rakernas Perbarindo di Batam, Senin (26/11). Joko menambahkan dari sisi jumlah nasabah BPR juga terus meningkat sepanjang tahun yakni tumbuh 8,53% tahun 2010, 7,67% tahun 2011 dan tumbuh 1,35% hingga akhir September 2012. Selain itu, lanjut Joko, industri BPR juga mampu meningkatkan efisiensi dengan menurunnya rasio beban operasional terhadap

pendapatan operasional (BOPO) sejak tahun 2010. Tahun 2010 BOPO BPR menurun 0,85%, tahun 2011 menurun 1,50% dan September 2012 menurun 1,89%. Penurunan itu seiring dengan penurunan suku bunga kredit konsumsi dari tahun 2009 hingga September 2012 yang berhasil diturunkan BPR sebesar 2,7%, suku bunga kredit investasi sebesar 3,12% dan suku bunga kredit modal kerja 3,55%. Sementara itu Santoso Wibowo, Direktur Pengembangan BPR, Kredit dan UMKM Bank Indonesia menyebutkan jumlah BPR dalam kategori sehat di Indonesia berada di atas 85% dari total 1.669 BPR saat ini. “Yang sehat di atas 85%, tapi yang tidak sehat dibawah 1%, masih sedikit sekali,” ujarnya. Ia mengingatkan jika ada BPR yang mengalami kerugian, pemiliknya harus memberikan injeksi modal untuk menyelamatkan BPR tersebut. Sementara jika pemilik tidak bisa memberikan modal, seharusnya pemilik meminta bantuan kepada Perbarindo untuk menyelamatkan BPR tersebut. “Kalau tidak bisa injeksi modal, ada peran Perbarindo disitu,” paparnya. (<http://www.perbarindo.or.id>)

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bahwa ada dua jenis bank, yaitu BANK UMUM dan BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.

dapun usaha-usaha BPR adalah :Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.Memberikan kredit. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain. SBI adalah sertifikat yang ditawarkan Bank Indonesia kepada BPR apabila BPR mengalami over likuiditas.

Usaha yang tidak boleh dilakukan BPR adalah :

1. Menerima simpanan berupa giro.
2. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudent banking dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah.
4. Melakukan usaha perasuransian.
5. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana yang dimaksud dalam usaha BPR.

Melalui Peraturan Bank Indonesia, BPR diberi kesempatan untuk mempercepat pengembangan jaringan kantor dengan membuka Kantor Cabang dan Kantor Kas, sehingga ini akan semakin memperluas jangkauan BPR dalam menyediakan layanan keuangan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah.

Pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor lain. Oleh karena itu peneliti memasukkan (*good corporate*

governance(GCG), corporate social responsibility (CSR), dan Sustainability) dan juga kinerja keuangan rasio profitabilitas dengan metode (*Return On Asset(ROA)*)

Didalam Penerapan *good corporate governance* merupakan salah faktor keuangan non keuangan yang sekarang ini dipertimbangkan oleh BPR. Sejak krisis ekonomi tahun 1997 pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, atau lebih dikenal dengan *Good Corporate Governance(GCG)* menjadi isu yang mengemuka di Indonesia. Akibat buruknya tata kelola perusahaan di Indonesia pada masa itu, menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk. Semenjak itulah, semua pihak sepakat untuk dapat bangkit dari keterpurukan, Indonesia harus memulai dengan tata kelola yang baik dari pemerintah, perusahaan pemerintah, dan swasta. Berbagai upaya memperbaiki tata kelola dilakukan dengan menerapkan prinsip GCG di semua lini masyarakat (Zarkasyi, 2008).

Dalam seminar restrukturisasi perbankan di Jakarta pada tahun 1998 disimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan *corporate governance* ini dinilai dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Menurut Niu (2006) dalam Praptiningsih (2009), *corporate governance* yang lebih kuat akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitian lain, (Eldomiatty & Choi, 2003) menegaskan bahwa lembaga perbankan sebenarnya telah memiliki kontribusi positif untuk kinerja perusahaan yang menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dapat memecahkan masalah agency khususnya perusahaan perbankan. Harapan dari penerapan sistem *good corporate governance* adalah tercapainya kinerja keuangan (Tumirin, 2007 dalam Tirta, 2009). *Good corporate governance* yaitu sebuah konsep yang menekankan pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat, benar dan tepat waktu. Selain itu juga menunjukkan kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan (*disclosure*) semua informasi keuangan kinerja perusahaan secara akurat, tepat waktu dan transparan (Tjager, 2003 dalam Darmawati, 2004). Pelaksanaan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Oleh karena itu *Bank for International Settlement* (BIS) sebagai lembaga yang mengkaji terus menerus prinsip kehati-hatian harus dianut oleh perbankan (Pedoman GCG Perbankan : 2004).

Selain menerapkan GCG perusahaan BPR juga harus memperhatikan pelaksanaan lainnya yaitu *Corporate Social Responsibility*(CSR) atau tanggung jawab sosial yang merupakan faktor non keuangan lainnya yang saat ini banyak dipertimbangkan. *Corporate Social Responsibility*(CSR) merupakan bagian dari

strategi bisnisnya, untuk menunjang keberlangsungan perusahaan dimasa mendatang. Menurut Yuniasih dan Wirakusuma (2007). Pemikiran yang melandasi *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) yang sering dianggap inti dari etika bisnis adalah bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal. Tanggung jawab pertama suatu bisnis adalah tanggung jawab ekonomi untuk mendapatkan laba, agar perusahaan dapat tetap menjalankan bisnisnya, melayani pelanggan dan menciptakan lapangan kerja. Akan tetapi, masyarakat meminta agar semua perusahaan juga memenuhi tanggung jawab social, etika, dan hukum. System bisnis kita beroperasi dalam suatu lingkungan yang perilaku etisnya, tanggung jawab sosialnya, peraturan pemerintah dan undang-undangnya saling berkaitan satu sama lain.

CSR merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas operasional perusahaan. Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungannya, image perusahaan menjadi meningkat. Investor lebih berminat pada perusahaan yang memiliki citra yang baik di masyarakat karena semakin baiknya citra perusahaan, loyalitas konsumen semakin tinggi sehingga dalam waktu lama penjualan perusahaan akan membaik dan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Dyah & Danies (2012). Efisien dan signifikansi dari CSR masih belum dapat terbaca sepenuhnya oleh pelaku bisnis, sehingga CSR sendiri bagi sebagian pelaku bisnis baru sekedar wacana dan terkadang implementasinya berdasarkan atas tuntutan masyarakat

(Tanuadjaja, 2005:2) Praktik dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsekuensi logis dari implementasi konsep Corporate Governance, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan stakeholders-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan stakeholders-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama, 2007)

Selain itu tanggung jawab juga harus memperhatikan *sustainability* keberlanjutan perusahaan berharap kinerja keuangan perbankan BPR menjadi lebih bagus Laporan keberlanjutan (*Sustainability Report*) sering menjadi tren dan kebutuhan bagi perusahaan progresif untuk menginformasikan perihal kinerja ekonomi, sosial dan lingkungannya sekaligus kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) perusahaan (Chariri, 2009). *Sustainability Reporting* memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa bertumbuh secara berkesinambungan (*sustainable performance*). *Sustainability* (keberlanjutan) adalah keseimbangan antara *people-planet-profit*, yang dikenal dengan konsep *Triple Bottom Line* (TBL). *Sustainability* terletak pada pertemuan antara tiga aspek, *people-sosial*; *planet-environment*; dan *profit-economic*. Maka menurut Elkington (1997), perusahaan harus bertanggung-jawab atas dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Makna lain dari keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai

hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini. Dalam pidatonya menjelaskan bahwa keberlanjutan tidak berarti kemudian memerlukan penghematan sumber daya yang sedemikian khusus, melainkan hanya memastikan kecukupan sumber daya (kombinasi dari sumber daya manusia, fisik, dan alam) untuk generasi mendatang, sehingga membuat standar hidup mereka setidaknya sama baiknya dengan generasi saat ini.

Selain harus memperhatikan *Good corporate governance* (GCG), *Corporate Social Responsibility* (CSR), *Sustainability* (keberlanjutan), di BPR tersebut yang disebutkan, juga harus memperhatikan kinerja keuangan yang ada di rasio Profitabilitas dengan metode (*Return On Asset* (ROA)). Perusahaan dapat melihat dari profitabilitas BPR itu sendiri. Jika semakin tinggi profitabilitas maka semakin baik kinerja BPR itu, profitabilitas suatu perusahaan dapat diukur dengan menghubungkan antara keuntungan atau laba yang diperoleh dari suatu kegiatan pokok perusahaan dengan kekayaan atau asset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan perusahaan yaitu *Return On Asset* (ROA).

Menurut Brigham dan Houston (2010:146) menjelaskan untuk mengukur profitabilitas bank, biasanya menggunakan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas sudah mencakup rasio utang, rasio aktivitas maupun rasio likuiditas. Keuntungan menggunakan *Return On Asset* ROA adalah pengukuran yang komprehensif dimana semua yang mempengaruhi laporan keuangan dapat tercermin.

Dalam suatu penelitian terdahulu bisa dilihat dari beberapa penelitian yang dilakukan berbagai orang seperti penelitian Penelitian yang dilakukan Klapper dan Love (2002) dalam Darmawati, dkk. (2005) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan *return on assets* (ROA) dan Tobin's Q. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk, sehingga nilai perusahaan meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulupui (2007) dalam Yuniasih dan Wirakusuma (2007) menemukan hasil bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap *return* saham satu periode ke depan. Oleh karena itu, ROA merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Makaryawati (2002), Carlson dan Bathala (1997) dalam Suranta dan Pratana (2004) juga menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Namun, hasil berbeda diperoleh oleh Suranta dan Pratana (2004) serta Kaaro dalam Yuniasih dan Wirakusuma (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa ROA justru berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang turut mempengaruhi ROA dengan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penulis memasukkan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai variabel pemoderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut.

Penelitian yang dilakukan Yuniasih dan Wirakusuma (2007) meneliti pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR) dan *good corporate governance* (GCG) sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian ini ingin mengetahui: (1) apakah kinerja keuangan yang diproksikan dengan *return on asset* (ROA) berpengaruh terhadap nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q, (2) apakah pengungkapan CSR mempengaruhi hubungan kinerja keuangan dengan nilai perusahaan, dan (3) apakah GCG yang diproksikan dengan kepemilikan manajerial mempengaruhi hubungan antara kinerja keuangan dan nilai perusahaan. Untuk mengukur seberapa efektif perusahaan yang beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan atau mencapai tujuan profit keseluruhan, terutama dalam menghubungkannya dengan sumber-sumber yang diinvestasikan digunakan rasio profitabilitas yang terdiri dari *return on equity* (ROE), Rasio *return on asset* (ROA), digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset tertentu. Nilai rasio ROA yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Sebaliknya apabila ROA yang negatif menunjukkan bahwa dari total aktifa yang dipergunakan, perusahaan mendapatkan kerugian.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Annisa dan Wiwin (2009) berkaitan dengan sustainability report dan kinerja perusahaan menunjukkan hasil bahwa perusahaan-perusahaan yang mengungkapkan laporan berkelanjutan memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan dilihat dari sisi

profitabilitas. Konsep *sustainability* pada mulanya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memanen lebih banyak daripada kemampuan panen hutan pada kondisi normal. Kata *nachhaltigkeit* (bahasa Jerman untuk keberlanjutan) berarti upaya melestarikan sumber daya alam untuk masa depan (Agricultural Economic Research Institut, 2004) dalam (Kuhlman, 2010) Penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan dalam hal ini *return on asset* (ROA) terhadap nilai perusahaan menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Modigliani dan Miller dalam Ulupui (2007) menyatakan bahwa nilai perusahaan ditentukan oleh *earningspower* dari aset perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *earningspower* semakin efisien perputaran aset dan atau semakin tinggi *profit margin* yang diperoleh perusahaan. Hal ini berdampak pada peningkatan nilai perusahaan.

Di dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat perbandingan bagaimana *Good Corporate Governemance, Social Responsibility, Sustainability*, kinerja keuangan profitabilitas dengan metode (*Return OnAsset(ROA)*) di perusahaan BPR Bekasi dan Bogor.

Berdasar latar belakang di atas, penyusun akan melakukan penelitian yang lebih spesifik dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN DALAM PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE, SOCIAL RESPONSIBILITY, SUSTAINABILITY RETURN ON ASSET (ROA) DI PERUSAHAAN BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) ANTARA KOTA BEKASI DAN BOGOR TAHUN 2014”**.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang dijelaskan maka identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability Return OnAsset* (ROA) di perusahaan BPR Bekasi?
2. Bagaimana pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability* dan *Return OnAsset* (ROA) di perusahaan BPR Bogor?
3. Apakah ada perbedaan penerapan antara pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability Return On Asset* (ROA) di perusahaan BPR antara Bekasi dan Bogor?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan, mengetahui, dan menganalisis apakah ada perbedaan. Permasalahan yang telah diidentifikasi diatas yaitu untuk menganalisis :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability* dan *Return On Asset* (ROA) di perusahaan BPR Bekasi.
2. Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability* dan *Return On Asset* (ROA) di perusahaan BPR Bogor.
3. Untuk mengetahui dan memahami apakah ada perbedaan penerapan pelaksanaan *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability* *Return On Asset* (ROA) di perusahaan BPR antara Bekasi dan Bogor.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapaun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian dapat sebagai bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menambah khasanah ilmu pengetahuan , khususnya tentang *good corporate governance, social responsibility, sustainability* dan ROA perusahaan BPR.
2. Untuk pengembangan akademik agar dapat melakukan penelitian yang lebih spesifik dan dengan variabel yang berbeda, sehingga diperoleh pemahaman baru yang lebih baik dan lebih luas bagi pengetahuan mahasiswa.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan serta bukti empiris mengenai adanya perbedaan penerapan antara *Good Corporate Governance, Social Responsibility, Sustainability, Return OnAsset(ROA)* di perusahaan BPR Bekasi dan Bogor dan juga nilai perusahaan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

1.5.1 Kerangka pemikiran

Kinerja perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat memberikan nilai kepada perusahaan tersebut. Dengan mengetahui kinerja perusahaan kita dapat mengukur tingkat efisiensi dan produktifitas perusahaan tersebut. Disamping itu juga penilaian kinerja perusahaan yang bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana perkembangan suatu perusahaan. Pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. (Rivai & Basri, 2004:16. Kinerja perusahaan (*Companies performance*) merupakan sesuatu yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dengan mengacu kepada standar yang ditetapkan. Pengukuran aktivitas kinerja perusahaan dirancang untuk menaksir bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai. Dalam peneliti ini memperhatikan GCG, CSR, *sustainability* dan kinerja keuangannya.

Tujuan utama GCG adalah meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas, menciptakan system pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*), mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. Penerapan GCG secara benar dan konsisten diharapkan dapat menciptakan fundamental yang kuat bagi peningkatan

nilai perusahaan dalam jangka panjang melalui peningkatan kinerja yang tinggi serta penciptaan citra perusahaan yang positif.

Corporate governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan (M. Nasution dan D. Setiawan (2007)). *Corporate governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamkan tidak diambil alih atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. *Corporate governance* diperlukan untuk mengurangi permasalahan keagenan antara pemilik dan manajer (Macey dan O'Hara, 2003).

Perusahaan semakin menyadari bahwa kelangsungan hidup perusahaan juga tergantung dari hubungan perusahaan dengan masyarakat dan lingkungannya tempat perusahaan beroperasi. Hal ini sejalan dengan *legitimacy theory* yang menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat untuk melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai *justice*, dan bagaimana perusahaan menanggapi berbagai kelompok kepentingan untuk melegitimasi tindakan perusahaan (Tilt, CA. 1994).

Menurut Hackston dan Milne dalam Cahya (2010), tanggung jawab sosial perusahaan sering disebut juga sebagai *corporate social responsibility* atau *social disclosure*, *corporate social reporting*, *social reporting* merupakan proses pengomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005) perusahaan memiliki kewajiban sosial atas apa yang terjadi disekitar lingkungan masyarakat.

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasi utamanya dan kaitannya dengan *stakeholders*, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004). *Corporate social responsibility* dapat didefinisikan sebagai suatu konsep perusahaan untuk memenuhi dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* dalam kegiatan operasinya mencari keuntungan. *Stakeholder* yang dimaksud diantaranya adalah para *shareholder*, karyawan, pelanggan, komunitas lokal, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan lain sebagainya (Agoes, 2009:100).

CSR menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan lagi sekedar kegiatan ekonomi, yang menciptakan profit demi kelangsungan usaha, tapi juga tanggung jawab sosial dan lingkungan (SWA:2005) dalam Saputra (2009). Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktifitas operasional yang dilakukan perusahaan

Sustainability atau keberlanjutan seperti yang dikemukakan oleh ekonom Solow (1991) dalam (Whitehead, 2006) mengemukakan keberlanjutan sebagai hasil masyarakat yang memungkinkan generasi mendatang setidaknya tetap memiliki kekayaan alam yang sama dengan generasi yang ada pada saat ini.

Dalam kinerja perusahaan yang harus juga diperhatikan yaitu bagaimana kinerja keuangannya. Dari kinerja keuangan ada banyak rasio keuangan yang dibuat sesuai kebutuhan para analis yang biasa digunakan dalam melakukan analisis keuangan.

Untuk melihat kinerja keuangan yang ada di perusahaan BPR dengan mengambil rasio profitabilitas dengan metode *Return On Asset (ROA)* yang salah satu alat ukur *financial* yang umum digunakan oleh perusahaan. Menurut Syahyunan (2004:85), "*Return on Assets* menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan".

Menurut Gitman (2009:68) "*ROA measures the overall effectiveness of management in generating profits with its available assets*". Sedangkan Tambunan (2008:147) adalah suatu rasio untuk mengukur imbal-imbil perusahaan berdasarkan pendayagunaan *Total Asset*.

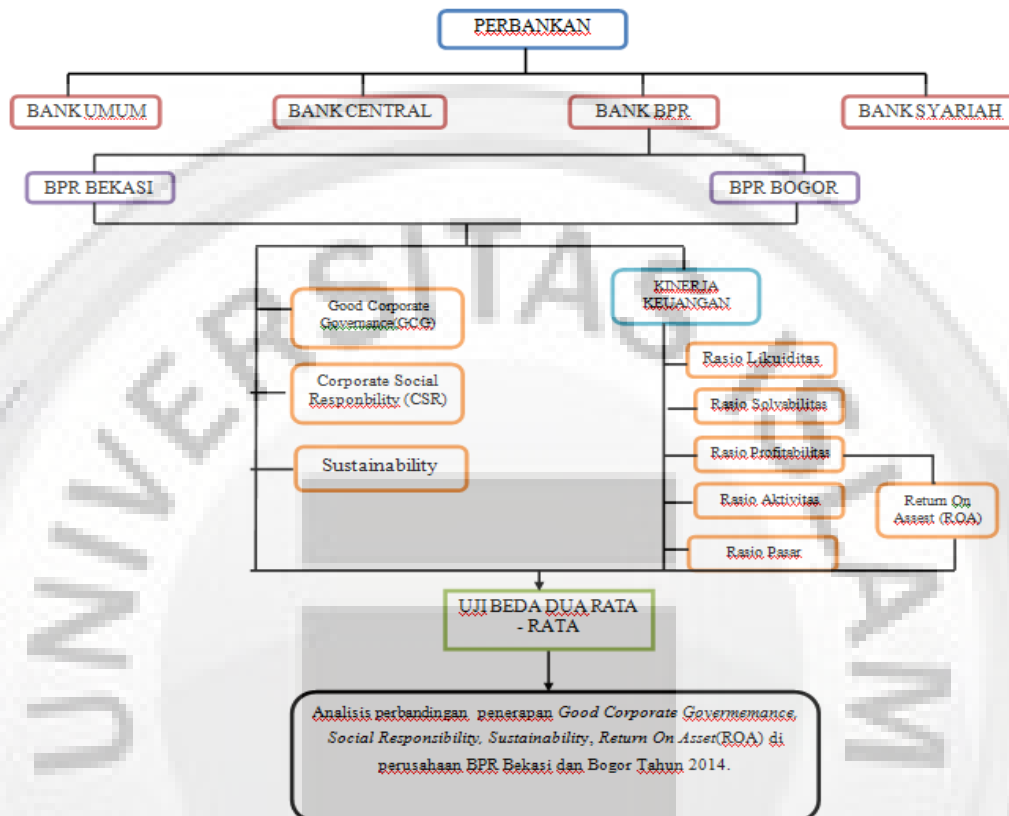
Corporate Governance mengarahkan pengelolaan perusahaan pada upaya pencapaian *profit* dan *sustainability* secara seimbang (Daniri,2006). *Sosial responsibility* menurut Lehman (1995) dan Deegan & Rankin (1996) (dalam Haniffa dan Cooke(2005)) pengungkapan laporan pertanggung jawaban sosial dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, diantaranya adalah tingkat *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan faktor etnik kepemimpinan

perusahaan. Di beberapa negara organisasi perusahaan dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan karena tradisi bangsa dapat mencerminkan kepribadian seseorang dan mungkin dapat membantu menjelaskan siapa mereka sebenarnya.

Herremans et al, 1993 dalam Iryanie, 2009 mengemukakan beberapa pokok pikiran mengenai hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan dan kinerja ekonomi. Fombrun et al (2000) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat meningkatkan reputasi perusahaan terhadap konsumen sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Fiori et al (2007) mengemukakan berikut manfaat yang diperoleh perusahaan yang mengungkapkan sustainability report untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Gambar 1.1

Bagan Kerangka Pemikiran



1.5.2 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dengan merumuskan hipotesis bahwa “ terdapat perbedaan penerapan antara *Good Corporate Governance*, *Social Responsibility*, *Sustainability* , dan *Return On Asset (ROA)* di perusahaan BPR Bekasi dan Bogor Tahun 2014”.